BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial antarumat beragama merupakan fenomena yang senantiasa menjadi perhatian dalam masyarakat multikultural, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan pluralitas agama yang sangat tinggi, keberagaman tersebut kerap kali memunculkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, keberagaman ini menjadi kekayaan budaya yang memperkuat harmoni sosial. Namun, di sisi lain, perbedaan keyakinan sering kali menjadi pemicu konflik horizontal yang berakar pada stereotip, prasangka, atau bahkan kebijakan yang diskriminatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama meluncurkan program Kampung Moderasi Beragama (KMB) sebagai upaya konkret membangun ruang interaksi sosial yang lebih inklusif. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan KMB di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung, masih menghadapi berbagai masalah. Misalnya, masih adanya kesenjangan pemahaman antarumat beragama, resistensi sebagian masyarakat terhadap interaksi lintas agama, hingga hambatan administratif seperti sulitnya perizinan rumah ibadah yang kerap memicu gesekan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KMB digagas untuk mereduksi konflik dan memperkuat toleransi, realitas di lapangan masih memperlihatkan tantangan yang signifikan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memahami dinamika interaksi sosial antarumat beragama di Indonesia adalah Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh SETARA Institute. Penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute terkait IKT menjadi tolak ukur penting dalam memahami kondisi kebebasan beragama dan keberagaman di berbagai kota di Indonesia. Indeks ini menggunakan rentang nilai 1-7, di mana “nilai 1” menunjukkan kondisi paling buruk, sedangkan “nilai 7” menunjukkan situasi yang paling baik. Berdasarkan laporan SETARA Institute (2023), beberapa kota di Indonesia secara nasional seperti Cilegon, Depok, dan Padang memiliki nilai di bawah “nilai 6”, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam menciptakan ruang dialog antarumat beragama yang inklusif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan moderasi beragama yang diusung oleh pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan (Madrin, 2023). Selain itu, Lestari (2024) mengatakan bahwa selama satu dekade terakhir, Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, selalu masuk dalam daftar sepuluh besar provinsi dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, Jawa Barat mencatat 47 kasus pelanggaran kebebasan beragama, menjadikannya provinsi dengan jumlah pelanggaran terbanyak (Lestari, 2024).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Hermawati, Paskarina, dan Runiawati (2016) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap dinamika interaksi antarumat beragama di Kota Bandung adalah sulitnya perizinan pembangunan rumah ibadat. Studi ini menegaskan bahwa kendala administratif sering kali menjadi pemicu konflik berbasis agama. Menurut mereka, “isu agama masih menjadi faktor dominan dalam membentuk sentimen berbasis identitas kelompok, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat” (Hermawati, Paskarina, & Runiawati, 2016, h. 122).

Laporan SETARA Institute pada tahun 2023 semakin memperkuat temuan tersebut dengan mencatat masih adanya diskriminasi kebijakan di tingkat lokal yang dapat menghambat interaksi antarumat beragama yang harmonis. Laporan SETARA Institute (2023) menunjukkan bahwa Kota Bandung menduduki peringkat ke-16 dari 94 kota yang dinilai dalam Indeks Kota Toleran. Meskipun peringkat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang berada di posisi ke-26, Kota Bandung masih tertinggal dari kota-kota seperti Sukabumi, Manado, dan Singkawang, yang konsisten menempati posisi teratas dalam indeks toleransi nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Bandung tidak berada dalam kategori kota dengan tingkat toleransi yang lebih baik, meskipun dikenal sebagai kota yang multikultural dengan masyarakat yang heterogen (Anes, 2023).

Munculnya program kerja dari Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang bernamakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) di beberapa wilayah Indonesia menjadi upaya konkret untuk membangun harmoni

sosial dan mengurangi potensi konflik berbasis agama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). KMB telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Program ini berupaya untuk menciptakan ruang interaksi yang inklusif, mengurangi potensi konflik berbasis agama, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya toleransi dan harmoni sosial. Namun, efektivitas program ini dalam meningkatkan indeks toleransi di Kota Bandung masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan pengalaman langsung dalam isu moderasi beragama, Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti implementasi Kampung Moderasi Beragama di Kota Bandung. Pengalaman ini diperoleh saat Peneliti menjadi delegasi dari Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Bandung dalam acara “*Delegation of the 8th Indonesia-Austria Interfaith and Intercultural Dialogue: Navigating the Challenges in Diverse and Modern Society*”. Acara ini memberikan wawasan tentang pentingnya dialog antarumat beragama dan budaya dalam memperkuat toleransi di masyarakat modern. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan pemahaman antaragama, resistensi terhadap interaksi sosial antarumat beragama, hingga potensi politisasi isu agama sebagai mana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Acara Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Bandung Wetan

Sumber: Peneliti

Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengkaji program Kampung Moderasi Beragama dapat menjadi model interaksi sosial yang ideal dan apakah keberadaan program ini dapat meningkatkan indeks toleransi Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan apakah realitas sosial di Kota Bandung benar-benar mencerminkan peringkat dalam Indeks Kota Toleran yang dirilis oleh SETARA Institute. Dengan meneliti lebih dalam implementasi program KMB, penelitian ini ingin membuktikan apakah Kota Bandung memang memiliki tingkat toleransi yang rendah seperti yang dilaporkan oleh SETARA Institute atau justru terdapat potensi toleransi yang lebih tinggi yang belum teridentifikasi secara optimal dalam penilaian tersebut. Untuk tujuan ini, penelitian ini akan difokuskan pada persoalan dialog antarumat beragama Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Bandung Wetan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi aplikatif bagi upaya penguatan moderasi beragama di tingkat lokal maupun nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah pernah terjadi konflik antarumat beragama di Kecamatan Bandung Wetan?
2. Bentuk dialog antarumat beragama apa yang terjadi di Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Bandung Wetan?
3. Bagaimana Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Bandung Wetan memberikan implikasi terhadap interaksi sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pernah terjadi konflik antarumat beragama di Kecamatan Bandung Wetan;

2. Untuk mengetahui bentuk dialog antarumat beragama yang terjadi di Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Bandung Wetan; dan
3. Untuk mengetahui implikasi Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Bandung Wetan terhadap interaksi sosial masyarakat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam konteks sosial. Adapun kegunaan lebih lanjut yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam studi interaksi sosial dan relasi antarumat beragama, dengan menelaah bagaimana moderasi beragama dikonstruksi dalam masyarakat multireligius. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, penelitian ini memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana makna toleransi dan harmoni sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian akademik, penelitian ini memperluas diskursus tentang interaksi sosial antarumat beragama dengan menambahkan analisis berbasis fenomenologi yang mengeksplorasi pengalaman subjektif individu dalam menjalani dialog antarumat beragama. Studi ini juga memperkaya kajian sosiologi agama dengan mengungkap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola relasi antarumat beragama, seperti kebijakan lokal, dinamika komunitas, dan wacana keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang bagaimana norma sosial yang mendukung toleransi terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat multikultural.

2. Kegunaan Sosial

Secara sosial dari penelitian ini ditujukan untuk membekali tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dengan panduan praktis dalam merancang serta melaksanakan kegiatan yang memperkuat dialog antarumat beragama. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya mampu mengidentifikasi solusi atas masalah konflik berbasis agama, tetapi juga mendorong terbentuknya kerukunan dan keharmonisan sosial yang lebih baik di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi para akademisi, dan praktisi dalam menyusun kebijakan berbasis bukti yang mendukung peningkatan toleransi antarumat beragama di masyarakat yang majemuk. Penelitian ini juga dapat memacu evaluasi serta pengembangan program pemerintah, seperti Kampung Moderasi Beragama, untuk lebih efektif dalam menumbuhkan sikap toleransi di tingkat nasional.

E. Kerangka Berpikir

Dalam memahami dinamika interaksi sosial antarumat beragama di Kampung Moderasi Beragama (KMB), penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menyoroti bagaimana realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam interaksi manusia. Dalam konteks KMB, nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama tidak muncul secara alami, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berlangsung melalui dialog, kebijakan, dan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis untuk melihat bagaimana masyarakat di KMB membangun pemahaman bersama tentang moderasi beragama serta bagaimana nilai-nilai tersebut bertahan dan berkembang dalam lingkungan sosial yang lebih luas.

Peneliti menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai kerangka berpikirnya. Teori ini berfokus pada bagaimana realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi,

dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Kampung Moderasi Beragama (KMB), teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama bersama-sama membangun pemahaman dan praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menggali proses pembentukan makna kolektif terkait moderasi beragama, serta memahami bagaimana interaksi sosial antarumat beragama di KMB menjadi bagian dari konstruksi sosial yang lebih luas (Sulaiman, 2016).

Adapun dalam menganalisis masalahnya, Peneliti menjabarkan dalam bentuk skema kerangka berpikir sebagaimana pada Gambar 1.2 di bawah ini di antaranya sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Skema Kerangka Berpikir

Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan fenomena konflik antarumat beragama yang terjadi di masyarakat. Konflik ini dapat berupa

ketegangan sosial, kesalahpahaman, atau perbedaan kepentingan yang menghambat terciptanya harmoni antar kelompok agama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibentuk program Kampung Moderasi Beragama (KMB) sebagai upaya untuk membangun pemahaman bersama melalui dialog antarumat beragama. Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih inklusif serta menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah program ini diimplementasikan, terjadi berbagai implikasi sosial, seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai, terbentuknya mekanisme penyelesaian konflik berbasis dialog, serta semakin kuatnya keterikatan sosial antar kelompok agama. Hal ini berpengaruh pada interaksi sosial masyarakat di KMB, di mana pola hubungan antarumat beragama menjadi lebih harmonis dengan adanya sikap saling menghargai dan keterbukaan dalam berdiskusi.

Teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan perkembangan dari teori interaksionisme simbolik, yang berakar pada pemikiran Max Weber dan George Herbert Mead dalam tradisi sosiologi klasik (Berger & Luckmann, 1967). Weber, melalui teori aksi sosialnya, menekankan bahwa tindakan sosial memiliki makna subjektif yang diberikan oleh individu, yang kemudian menginspirasi Berger dalam melihat bagaimana realitas sosial dibangun melalui makna yang disepakati bersama. Sementara itu, Mead menjelaskan bahwa identitas dan realitas sosial terbentuk melalui interaksi menggunakan simbol dan bahasa, sebuah gagasan yang diperluas oleh Berger dan Luckmann dengan menunjukkan bahwa realitas sosial tidak hanya dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga dilembagakan dan diwariskan antar generasi. Selain itu, meskipun Émile Durkheim melihat fakta sosial sebagai sesuatu yang objektif dan berada di luar individu, Berger dan Luckmann justru berpendapat bahwa realitas sosial bukan sepenuhnya objektif, melainkan hasil konstruksi yang terus-menerus dinegosiasikan oleh individu dan kelompok. Dengan demikian, teori konstruksi sosial dari Berger dapat dikategorikan sebagai turunan dari teori interaksionisme

simbolik, yang juga dipengaruhi oleh Weber dan sebagian menantang pandangan Durkheim (Dharma, 2018).

Konstruksi sosial adalah konsep yang menyatakan bahwa banyak aspek dari kehidupan sosial, seperti norma, nilai, dan realitas, dibentuk melalui interaksi dan komunikasi antarindividu dan kelompok. Dalam pemikiran ini, realitas sosial tidak dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis. Hadiwijaya (2023) menjelaskan teori ini menekankan bahwa individu tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam menciptakan makna dan interpretasi dari pengalaman mereka. Konstruksi sosial mencakup berbagai bidang, termasuk identitas, gender, etnisitas, dan tentu saja, kepercayaan agama. Melalui interaksi sosial, individu membentuk perspektif mereka tentang dunia, yang kemudian memengaruhi bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, konstruksi sosial membantu kita memahami bahwa realitas yang kita jalani sehari-hari adalah hasil dari proses sosial yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor, termasuk budaya, sejarah, dan konteks sosial (Hadiwijaya, 2023).

Menurut Muhammadiyah (2025) teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku mereka *The Social Construction of Reality* (1966) menyatakan bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial dan proses sosialisasi. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia tidak sepenuhnya objektif, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan historis. Melalui interaksi sehari-hari, individu dan kelompok menciptakan, memelihara, dan mengubah makna serta realitas sosial yang mereka hadapi (Muhammadiyah, 2025).

Dalam proses ini, bahasa memainkan peran sentral sebagai alat utama untuk mengkomunikasikan dan mempertahankan realitas yang dikonstruksi secara sosial. Bahasa memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dan membentuk pemahaman bersama tentang dunia. Selain itu, institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama berperan dalam menginternalisasi norma dan nilai yang

membentuk persepsi individu terhadap realitas. Dengan demikian, realitas sosial bersifat dinamis dan terus-menerus dibentuk oleh interaksi antara individu dan struktur sosial (Sulaiman, 2016).

Pemahaman tentang konstruksi sosial ini memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, antropologi, dan studi budaya. Dengan menyadari bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi bersama, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi asumsi dan keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Hal ini membuka ruang untuk perubahan sosial yang lebih inklusif dan reflektif terhadap keragaman pengalaman manusia.

Peneliti akan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai kerangka teoritis pada penelitian ini. Hadiwijaya (2023) menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat objektif atau tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang terus-menerus dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi manusia. Menurut Peter dan Thomas, realitas dibangun secara kolektif melalui berbagai pengalaman, bahasa, dan institusi yang ada dalam masyarakat. Melalui proses sosial, individu menerima dan menginternalisasi norma serta nilai yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan alami. Dengan demikian, apa yang dipahami sebagai “realitas” sesungguhnya merupakan konstruksi yang berasal dari interaksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Hadiwijaya, 2023).

Dalam konteks Kampung Moderasi Beragama (KMB) Kota Bandung, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama bersama-sama membangun pemahaman dan praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menggali proses pembentukan makna kolektif terkait moderasi beragama, serta memahami bagaimana interaksi sosial antarumat beragama di KMB menjadi bagian dari konstruksi sosial yang lebih luas (Sulaiman, 2016).

Proses pembentukan realitas sosial dapat dijelaskan melalui tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966).

1. Eksternalisasi

Pada tahap ini, individu atau kelompok mengekspresikan pemikiran, nilai, dan norma mereka ke dalam dunia luar. Eksternalisasi dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti bahasa, tindakan, dan simbol (Berger & Luckmann, 1966).

2. Objektivasi

Setelah nilai-nilai dan ide-ide diekspresikan, mereka mulai dipandang sebagai realitas sosial yang objektif. Pada tahap ini, masyarakat mulai menerima dan mengakui norma-norma yang telah diekspresikan. Proses objektivasi ini sering kali melibatkan penguatan norma melalui institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, dan media (Berger & Luckmann, 1966).

3. Internalisasi

Pada tahap terakhir, individu mengadopsi norma dan nilai yang telah dianggap sebagai bagian dari realitas sosial. Internalisasi berarti bahwa individu tidak hanya memahami norma tersebut, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam identitas mereka (Berger & Luckmann, 1966).

Teori konstruksi sosial memiliki aplikasi yang luas dalam studi interaksi sosial, terutama dalam memahami bagaimana individu dan kelompok menjalin hubungan dan membangun makna bersama. Dalam konteks interaksi sosial, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai dan norma terbentuk melalui komunikasi dan interaksi. Misalnya, dalam dialog antarumat beragama, partisipasi individu dalam diskusi dapat membantu membangun pemahaman bersama tentang perbedaan yang ada (Sulaiman, 2016).

Studi terkait interaksi sosial yang menggunakan pendekatan konstruksi sosial dapat mengeksplorasi bagaimana individu membentuk identitas mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui interaksi, mereka dapat menciptakan narasi tentang diri mereka dan kelompok mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Teori ini juga menyoroti pentingnya konteks sosial dalam membentuk makna, nilai-nilai, dan norma yang dianggap penting dalam satu komunitas mungkin tidak sama di komunitas lain. Dengan demikian, aplikasi teori konstruksi sosial dalam studi interaksi sosial memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hubungan sosial dan bagaimana perbedaan dapat dikelola melalui komunikasi yang efektif dan inklusif.

Untuk memahami bagaimana nilai-nilai moderasi beragama ini terbentuk dan bertahan dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks penelitian ini, eksternalisasi terjadi ketika individu dari berbagai latar belakang agama berpartisipasi dalam dialog dengan berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Kemudian, melalui objektivasi, nilai-nilai yang muncul dari dialog, seperti toleransi dan moderasi, mulai diterima oleh masyarakat sebagai norma yang diakui bersama. Pada tahap terakhir internalisasi, individu yang terlibat dalam dialog mulai menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari cara mereka berinteraksi sehari-hari dengan orang lain.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana dialog antarumat beragama di Kampung Moderasi Beragama dapat membentuk realitas sosial yang lebih harmonis melalui proses konstruksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi dan toleransi tidak muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat.